

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
REKOMENDASI TERHADAP PERIZINAN MAGANG DI LUAR NEGERI (PERPANJANGAN)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Jawa Barat (menggunakan Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel basah);
2.	Scan Surat Kuasa menggunakan kop surat dibubuhi materai 6.000 apabila dikuasakan tanda tangan asli bukan scan, cap/stempel basah;
3.	Scan Akte Notaris ASLI tentang Yayasan / Lembaga Pelatihan Kerja;
4.	Scan Surat Keputusan ASLI tentang izin Lembaga Pelatihan Kerja dan Sertifikat Izin yang dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota atau Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau OSS;
5.	Scan Kurikulum dan Silabus program pemagangan;
6.	Scan Ijasah ASLI Ketua dan Ijasah ASLI Staf Pengajar;
7.	Scan CV Ketua / Pimpinan (Penanggungjawab) Lembaga Pelatihan Kerja;
8.	Scan Struktur organisasi Lembaga Pelatihan Kerja;
9.	Dokumentasi sarana prasarana Lembaga Pelatihan Kerja;
10.	Scan perjanjian teknis antara peserta dengan Lembaga Pelatihan Kerja (contoh salah satu MOU);
11.	Scan MOU antara Lembaga Pengirim/Sending Organization (SO) dengan Lembaga Penerima Accepting Organization (AO) dicap Kedubes RI;
12.	Scan ASLI Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri bagi LPK yang mengajukan izin perpanjangan;
13.	Scan Asli NIB